

## **KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGATASI MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI DI SMA NEGERI 1 PUNDONG**

### ***SCHOOL POLICY IN OVERCOMING PROBLEM OF REPRODUCTIVE HEALTH AT SMA NEGERI 1 PUNDONG***

Awwalul Khoiriyah

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY

[akhoiriy@yahoo.com](mailto:akhoiriy@yahoo.com)

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan: (1) kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi, (2) Implementasi kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi, dan (3) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Uji keabsahan data triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi dengan membentuk ekstrakurikuler pusat informasi dan konseling remaja berdasarkan pada kebijakan makro dan kebijakan meso. (2) Implementasi kegiatan ekstrakurikuler pusat informasi dan konseling remaja merujuk empat aspek: komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. (3) Faktor pendukung: sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana. Faktor penghambatnya: kepasifan siswa terhadap kebijakan sekolah, siswa kurang terbuka jika mengalami masalah dan beberapa pelaksana kebijakan sekolah masih pasif.

Kata kunci: kebijakan sekolah, pusat informasi dan konseling remaja.

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to describe: (1) The school policy in overcoming problem of reproductive health, (2) Implementation of school policy in overcoming problem of reproductive health and (3) Supporting factors and inhibitors implementation school policy in overcoming problem of reproductive health. This research is a case study. The data analysis technique uses Miles and Huberman models. The validity of the data by means of triangulation of sources and technique. Research results: The results of the study show the following: (1) School policy in overcoming problem of reproductive health are applied through extracurricular information center and adolescent counseling based macro policies and meso policies. (2) Implementation extracurricular information center and adolescent counseling refers to four aspects: communication, resources, attitudes and bureaucratic structure. (3) Supporting factors: human resources, finance, facilities and infrastructure. The inhibiting factor: student passivity towards school policy, students are less open if they experience problems and some implementers of school policies are still passive.*

*Keywords: school policy, information center and adolescent counseling.*

## **PENDAHULUAN**

Tugas perkembangan yang kurang berkembang pada masa remaja dapat mengakibatkan perilaku beresiko. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali & Asrori (2006: 12) bahwa terdapat beberapa tugas perkembangan remaja yang penting untuk dipenuhi antara lain: mampu mengembangkan tanggungjawab pribadi dan sosial, menerima keadaan dirinya, menginternalisasikan nilai-nilai moral, memahami peran seks, merencanakan masa depan dan mengembangkan kemandirian maka tidak sedikit remaja yang melakukan perbuatan anti sosial maupun asusila karena tugas-tugas perkembangan tersebut kurang berkembang dengan baik.

Perilaku beresiko berdampak terhadap permasalahan kesehatan reproduksi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Smet (1994: 90) bahwa perilaku beresiko merokok, minum minuman beralkohol, penggunaan obat-obatan ilegal dan AIDS dapat mengakibatkan masalah pada kesehatan reproduksi. Remaja yang terjerumus dalam perilaku beresiko dapat menghambat dalam melaksanakan masa transisi kehidupan dibagi menjadi lima yang diungkapkan Bank Dunia dalam BKKBN (2015: 4) terdiri dari: melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat dan mempraktikkan hidup sehat. Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi (Miswanto, 2014: 120). Oleh karena itu, penting memberikan pendidikan kesehatan reproduksi supaya terhindar dari masalah kesehatan reproduksi.

Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemui permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian dari Salirawati, Pertiwi dan Endarwati tahun

2014 menunjukkan bahwa siswa Sekolah Menengah Atas sebanyak 60,3% belum sepenuhnya memahami tentang hubungan seksual, ada 51,3% pernah menonton video porno, 36,5% responden melihat video porno karena rasa ingin tahu dan 30,0% responden karena iseng. Demikian juga pada tahun 2015, Dinas Kesehatan Provinsi DIY mencatat terdapat 976 kasus hamil di luar pernikahan yakni: Bantul ada 276 kasus, Kota Yogyakarta ada 228 kasus, Sleman ada 219 kasus, Gunungkidul ada 148 kasus, dan Kulon Progo ada 105 kasus (Sumber: krjogja.com). Kehamilan tidak diinginkan merupakan akibat dari perilaku seksual pranikah berkaitan dengan aborsi karena kondisi remaja perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan umumnya tertekan secara psikologis dan secara psikososial belum siap menjalani kehamilan (Aisyaroh, 2010: 5). Data tersebut menggambarkan bahwa masalah kesehatan reproduksi belum diatasi dengan optimal maka harus segera ditangani dengan serius.

Permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja masih sulit untuk diatasi. Padahal, BKKBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 21 ayat 2 maka mengembangkan Program GenRe ditujukan kepada remaja melalui wadah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dan bina keluarga remaja. Keberadaan dan peran dari pusat informasi dan konseling remaja di lingkungan remaja penting untuk membantu remaja dalam memperoleh informasi dan pelayanan konseling (BKKBN, 2015: 5).

Respon sekolah untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja belum optimal. Berdasarkan studi literasi, Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bantul yang merespon masalah kesehatan reproduksi yaitu: SMA Negeri 1 Pundong, SMA Negeri 1 Kretek, SMA Negeri 1 Sewon, SMA Negeri 3 Bantul, SMA

Negeri 1 Sanden dan SMA Negeri 1 Srandakan. Demikian juga berdasarkan hasil observasi pada bulan desember, SMA Negeri 1 Pundong memiliki kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi dengan menetapkan ekstrakurikuler pusat informasi dan konseling remaja yang dilegalkan dengan surat keputusan kepala sekolah nomor 156/800 tahun 2007/2008. Penelitian ini ditujukan untuk menggali informasi tentang kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi diharapkan dapat memberikan gambaran secara empirik maka diperlukan kajian mendalam tentang kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi.

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan: a) Kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi, b) Implementasi kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan c) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi.

Hasil penelitian ini secara teoritis, untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Secara praktis sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kegiatan untuk menunjang ekstrakurikuler pusat informasi dan konseling remaja dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2017: 8) menjelaskan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti objek alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya menekankan pada makna. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah

penelitian tentang suatu kesatuan sistem dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu terkait oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu (Ghony & Almanshur, 2012: 61).

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Pundong karena dikenal sebagai sekolah dengan label "PIK-R" dan mendapatkan juara 1 lomba pusat informasi dan konseling remaja tingkat provinsi DIY. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan April.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu: kepala sekolah, guru, siswa dan pengurus pusat informasi dan konseling remaja. Wawancara yang ditujukan bagi kepala sekolah dan guru untuk mencari data tentang kebijakan sekolah untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi, alasan pemilihan kebijakan sekolah, landasan hukum, tujuan, manfaat, sasaran, waktu pelaksanaan, komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi, faktor pendukung, faktor penghambat dan cara mengatasinya.

Wawancara yang ditujukan bagi pengurus ekstrakurikuler *Apel Mama* untuk mencari data tentang kebijakan sekolah untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi, tujuan, manfaat, sasaran, komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi, faktor pendukung, faktor penghambat dan cara mengatasinya.

Wawancara yang ditujukan kepada siswa digunakan untuk mencari data tentang kebijakan sekolah untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi, manfaat, komunikasi, sikap, sumber daya manusia dan sumber daya sarana serta prasarana.

Informan kunci dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive* dengan menentukan subjek sesuai tujuan. Setelah diperoleh *key* informan untuk menentukan informan selanjutnya dengan menggunakan teknik *purposive*.

Objek dalam penelitian ini terkait dokumen dan kegiatan ekstrakurikuler *Apel Mama* sebagai kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017: 246) yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Sekolah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Reproduksi**

Terdapat beberapa bentuk dalam stratifikasi kebijakan pendidikan yang diutarakan oleh Nugroho (2006: 31) bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: (1) Kebijakan makro adalah kebijakan yang lingkupnya suatu negara dan dapat mempengaruhi secara menyeluruh; (2) Kebijakan meso yang berlaku untuk diwilayah tertentu dan turunan dari kebijakan makro dan (3) Kebijakan mikro merupakan kebijakan yang mencakup suatu kelompok atau organisasi tertentu. Bentuk kebijakan dalam proses implementasi memiliki sifat turunan berdasarkan hierarki.

Data hasil penelitian menunjukkan SMA Negeri 1 Pundong telah menetapkan ekstrakurikuler pusat informasi dan konseling remaja sebagai kebijakan sekolah berdasarkan pada: (1) Kebijakan makro terkait dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, berdasarkan amanah dalam Undang-Undang maka BKKBN mengembangkan Program Genre yang diwadahi melalui pusat informasi dan konseling remaja dan (2) SMA Negeri 1 Pundong merespon kebijakan tersebut dengan menetapkan kebijakan meso terkait dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 156/800 Tahun 2007/2008 Tentang Penetapan Pelantikan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah berupa ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler *Apel Mama* sebagai kebijakan sekolah dilaksanakan setiap tahunnya sejak dilegalkan dengan surat keputusan pada tahun 2007/2008.

Ekstrakurikuler *Apel Mama* dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran baru. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diatur oleh kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi karena memiliki kekuasaan dan kewenangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafaruddin (2008: 102) bahwa keberadaan sekolah merupakan lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan di tingkat nasional atau dinas pendidikan kabupaten/kota dalam kekuasaan dan kewenangan seorang kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah memiliki tugas untuk mengatur, bertanggungjawab, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler *Apel Mama*.

Kepala sekolah membuat surat keputusan nomor 800/292 tahun 2018/2019 menetapkan RSW sebagai guru pengampu ekstrakurikuler *Apel Mama* dan surat keputusan nomor 421/343 tahun 2018/2019 tentang penetapan pengurus ekstrakurikuler *Apel Mama*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zamroni (2013: 16) bahwa kepala sekolah juga membentuk tim-tim atau kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kepala sekolah membutuhkan bantuan dan sinergi dari warga sekolah maka kepala sekolah

membentuk dan menetapkan pelaksana ekstrakurikuler *Apel Mama*.

Tujuan dari ekstrakurikuler *Apel Mama* untuk membekali siswa tentang kesehatan reproduksi dan melaksanakan konseling pada siswa yang membutuhkan atau mengalami masalah kesehatan reproduksi. Pendidik maupun konselor sebaya yang telah terbekali melaksanakan layanan konsultasi dan konseling sehingga memudahkan siswa untuk mendapatkan sumber informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Tujuan ekstrakurikuler *Apel Mama* sesuai dengan rencana strategis BKKBN tahun 2015-2019 mempunyai dua tujuan yaitu: (1) Meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga melalui pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu antar sektor dan antara pusat dengan daerah tentang komunikasi, informasi dan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi dan (2) Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dalam pendidikan yaitu peningkatan fungsi dan peran serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok tentang pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Manfaat ekstrakurikuler *Apel Mama* untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada siswa supaya terhindar dari masalah kesehatan reproduksi. Manfaat untuk sekolah adalah dapat dikenal masyarakat melalui ekstrakurikuler *Apel Mama* karena telah memperoleh prestasi unggulan di tingkat kabupaten maupun provinsi dan membantu pemerintah meminimalisir terjadinya masalah kesehatan reproduksi melalui jalur pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan BKKBN (2015: 5) bahwa pusat informasi dan konseling remaja merupakan salah satu wadah yang

dikembangkan dalam program generasi berencana, yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR, keterampilan hidup dan genre.

Ekstrakurikuler *Apel Mama* telah melaksanakan pelayanan kesehatan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada siswa. Pelayanan kesehatan preventif yang dilakukan oleh pelaksana ekstrakurikuler *Apel Mama* melalui kegiatan sosialisasi dan layanan konsultasi. Pelayanan preventif sebagai upaya pencegahan supaya tidak terjadi masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

Pelayanan kesehatan kuratif dilakukan melalui layanan konseling untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Pelayanan kuratif sebagai upaya untuk mengobati dan mengurangi penderitaan dari konseli yang mengalami masalah kesehatan reproduksi. Pelaksana ekstrakurikuler *Apel Mama* melaksanakan pelayanan kesehatan rehabilitatif untuk membantu konseli yang mengalami masalah kesehatan reproduksi supaya dapat membaaur kembali dengan teman sebayanya dengan memberikan dorongan dan semangat supaya tetap percaya diri. Sebagaimana yang tercantum didalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 1 ayat (13), (14) dan (15).

### **Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Reproduksi**

Berdasarkan data implementasi kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi jika dianalisis dari teori Edward III yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi maka penjelasannya sebagai berikut ini.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu bentuk cara interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Dalam hal

ini antara pengurus ekstrakurikuler *Apel Mama* dengan siswa yang melibatkan pihak eksternal untuk melaksanakan kegiatan. Ekstrakurikuler *Apel Mama* dikomunikasikan dengan cara sosialisasi secara langsung. Ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasbullah (2016: 99) bahwa komunikasi berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan atau disebarluaskan kepada organisasi publik dan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan.

Sosialisasi dapat terlaksana karena pengurus ekstrakurikuler *Apel Mama* telah mengetahui yang harus dilaksanakan dan mengadakan koordinasi. Siswa juga menerima informasi dengan jelas bahwa ekstrakurikuler *Apel Mama* sebagai tempat untuk konsultasi dan konseling. Aspek komunikasi telah memenuhi tiga dimensi yang diungkapkan oleh Widodo (2008: 97) yaitu dimensi transmisi menghendaki supaya kebijakan disampaikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung; dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan sehingga kebijakan dapat diterima dengan jelas dan diantara mereka mengetahui maksud, sasaran dan tujuan serta substansi dari kebijakan dan dimensi transformasi menghendaki supaya kebijakan dapat ditransformasikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak terkait.

#### b. Sumber daya

Sumber daya merupakan segala sesuatu yang berwujud digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan. Ekstrakurikuler *Apel Mama* memiliki sumber daya manusia, finansial sarana dan prasarana.

##### (1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan dan kesediaan seseorang atau

kelompok yang berkerja sama dengan pihak eksternal untuk mengeksekusi suatu kebijakan. Sekolah melibatkan Puskesmas Pundong, Polsek Pundong dan PLKB Kecamatan Pundong untuk membantu pelaksanaan ekstrakurikuler *Apel Mama*. Pengurus ekstrakurikuler *Apel Mama* memiliki kemampuan, kesanggupan dan semangat sehingga dapat mengeksekusi kegiatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasbullah (2016: 99) bahwa ketersediaan sumber daya pendukung untuk mengeksekusi kebijakan yang berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

##### (2) Sumber daya sarana dan prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana berhubungan dengan ketersediaan gedung dan fasilitas penunjang yang telah disediakan untuk mensukseskan dalam mencapai tujuan suatu kebijakan. Dukungan sarana dan prasarana dapat bersumber dari pihak internal dan eksternal. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan ekstrakurikuler *Apel Mama* telah disediakan oleh sekolah dan bantuan dari BKKBN. Ekstrakurikuler *Apel Mama* mempunyai media sosial sebagai sarana untuk promosi dan berbagi informasi. Tersedianya sarana dan prasarana membantu pelaksana dalam mengeksekusi kegiatan dan memberikan pelayanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward III dalam Widodo (2008: 102) sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi imlementasi kebijakan meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya dapat memudahkan pelaksana dalam memberikan pelayanan.

##### (3) Sumber daya finansial

Sumber daya finansial berhubungan dengan ketersediaan anggaran dari pihak internal untuk melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksanaan ekstrakurikuler *Apel Mama* didukung oleh finansial dari sekolah dan kas. Sebagaimana yang dijelaskan Widodo (2008: 100) bahwa sumber daya yang mempengaruhi

efektivitas pelaksanaan kebijakan selain sumber daya manusia adalah dana atau anggaran. Aspek sumber daya yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi mendukung implementasi kegiatan ekstrakurikuler *Apel Mama*.

c. Sikap

Sikap merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan kesediaan dan komitmen yang dimiliki individu atau kelompok untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sikap pelaksana mempunyai komitmen dan sanggup mengeksekusi kebijakan. Sebagaimana yang dijelaskan Hasbullah (2016: 99) bahwa sikap berhubungan dengan kesediaan dan komitmen implementor untuk mengeksekusi kebijakan.

Sikap siswa pada ekstrakurikuler *Apel Mama* ada yang mendukung dan kurang mendukung. Siswa juga kurang berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler *Apel Mama*. Masih sedikit guru yang peduli untuk membantu dalam mengelola ekstrakurikuler *Apel Mama*.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan unit kerja dalam organisasi yang menunjukkan hierarki jabatan tentang pembagian tugas antar individu didalam suatu kebijakan. Koordinasi dalam kepengurusan ekstrakurikuler *Apel Mama* berupa pengawasan dari kepala sekolah serta dukungan sumber daya manusia dari pihak eksternal. Struktur birokrasi dalam implementasi ekstrakurikuler *Apel Mama* setiap tahun mengalami pergantian pengurus dan dilegalkan dengan surat keputusan. Sebagaimana yang diungkapkan Hasbullah (2016: 99) bahwa kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan dan tantangannya adalah supaya tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena dapat menjadikan proses implementasi menjadi tidak efektif.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Reproduksi**

a. Faktor pendukung implementasi kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi

Ketersediaan faktor pendukung pelaksanaan ekstrakurikuler *Apel Mama* adalah sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana. Guru pembimbing dan pengurus ekstrakurikuler *Apel Mama* mempunyai komitmen, kecakapan, dan kemampuan kerja sama dalam kelompok sehingga dapat implementasikan kegiatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rohman (2012: 115) bahwa salah satu faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah personil pelaksana, keadaan ataupun kemampuan personil pelaksana implementasi yang berhubungan dengan komitmen dan kemampuan kerja sama dalam kelompok.

Sumber daya sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah dan bantuan dari BKKBN telah mencukupi untuk pelaksanaan ekstrakurikuler *Apel Mama*. Sumber daya finansial yang dimiliki dapat membantu mencukupi kebutuhan yang diperlukan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan. Sekolah telah menyediakan anggaran ditambah dengan uang kas untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Sinergi antara sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler *Apel Mama*.

b. Faktor penghambat implementasi kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi

Pelaksanaan ekstrakurikuler *Apel Mama* masih mengalami hambatan antara lain: (a) Kepasifan siswa terhadap ekstrakurikuler *Apel Mama*. Siswa memberikan respon dengan bersifat menerima saja dan cukup mengetahui ekstrakurikuler pusat informasi dan konseling remaja. Siswa kurang berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler *Apel Mama*; (b) Siswa kurang bisa terbuka jika

mengalami masalah. Jarang siswa yang mau datang ke ekstrakurikuler *Apel Mama* karena menganggap masalah yang dialaminya adalah rahasia untuk dirinya sendiri; dan (c) Beberapa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler *Apel Mama* masih pasif. Siswa datang semauanya pada kegiatan ataupun pertemuan rutin karena siswa bosan dengan metode yang digunakan dalam memberikan materi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

#### 1. Kebijakan Sekolah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Reproduksi

Kebijakan sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi dengan menetapkan ekstrakurikuler pusat informasi dan konseling remaja *Apel Mama* berdasarkan kebijakan makro terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan penetapan program generasi berencana oleh BKKBN yang diturunkan menjadi kebijakan meso dengan surat keputusan kepala sekolah tentang pembentukan ekstrakurikuler pusat informasi dan konseling remaja. Ekstrakurikuler *Apel Mama* bertujuan untuk membekali siswa sehingga dapat melaksanakan konseling kepada siswa yang mengalami masalah kesehatan reproduksi melibatkan pihak internal dan eksternal. Melalui ekstrakurikuler *Apel Mama* siswa dapat mengerti tentang kesehatan reproduksi sehingga terhindar dari masalah kesehatan reproduksi. Pelaksana ekstrakurikuler *Apel Mama* melaksanakan pelayanan kesehatan preventif, kuratif dan rehabilitatif.

#### 2. Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Reproduksi

Implementasi merupakan suatu kinerja yang sistemk antar empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Komunikasi dilaksanakan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Khususnya dalam

aspek sikap, masih sedikit dukungan warga sekolah terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler *Apel Mama*. Pelaksana melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dalam struktur birokrasi. Berdasarkan sinergitas antara keempat aspek yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler *Apel Mama*.

#### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Reproduksi

Faktor pendukung implementasi kebijakan sekolah terdiri dari: ketersediaan sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi. Faktor penghambat implementasi kebijakan sekolah: kepasifan siswa, siswa kurang bisa terbuka dan pasifnya beberapa anggota ekstrakurikuler *Apel Mama* pasif. Cara untuk mengatasi hambatan dengan pendekatan pada siswa, memberikan himbauan, perekrutan dengan lebih selektif dan penerapan sistem denda.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan segala kekurangan dan keterbatasan penelitian, penulis mencoba untuk memberikan saran: (1) Bagi pengurus ekstrakurikuler *Apel Mama*: (a) Tingkatkan tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan dan (b) Penyimpanan dan pengarsipan berkas-berkas diperhatikan lagi. (2) Bagi Sekolah: (a) Sosialisasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk memberikan materi kesehatan reproduksi dan (b) Perlu disediakan poster dan slogan tentang kesehatan reproduksi dan pusat informasi dan konseling remaja. (3) Rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul: (a) Pemerintah mengadakan pelatihan untuk konselor sebaya dan (b) Kebijakan ekstrakurikuler pusat informasi dan konseling remaja wajib diimplementasikan dijenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat di Kabupaten Bantul.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyaroh, N. (2010). Kesehatan Reproduksi Remaja. Fakultas Ilmu Kesehatan Unisula. Diakses dari <http://e-journal.akbid-unisula.ac.id>. Pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 19:00 WIB
- Ali, M. & Asrori, M. (2006). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- BKKBN. (2015). *Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 456/PER/F6/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. (2015). *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 212/Per/B1/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*
- Ghony, M.D. & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Hasbullah, H. M. (2016). *Kebijakan Pendidikan : Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kemenkes. (2009). Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Kemenkes. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Miswanto. (2014). Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas pada Remaja. *Jurnal Studi Pemuda (Volume 3 Nomor 2)*. Hlm 111-121.
- Nugroho, R. D. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia
- Rohman, A. 2012. *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Salirawati, D., Pertiwi, K.R. & Endarwati, L. (2014). Survei Terhadap Pemahaman Pendidikan Seks dan Sikap/Perilaku Seks di Kalangan Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora (Volume 19 Nomor 1 April 2014)*. Hlm 84-94.
- Smet, B. (1994). *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: PT Grasindo
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningsih, E.K. (2016). Hamil di Luar Nikah, Mengapa Angkanya Tinggi?. Diakses dari <https://krjogja.com> pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 19:34 WIB.
- Syafaruddin. 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Zamroni. (2013). *Manajemen Pendidikan, Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.